

**STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA (GENERASI Z)
MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KUBU RAYA**Syarifah Nurma Afhiani¹, Elyta², Eka Apriyani³¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura

Email: syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id; elyta@fisip.untan.ac.id; eka.apriyani@fisip.untan.ac.id

Artikel histori:

Submit: 10-11-2023

Revisi: 26-05-2024

Diterima: 30-05-2024

Terbit: 04-06-2024

Kata Kunci:*elections,
novice voter,
political education strategy,
Z generation***Korespondensi:**

syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id

Abstrak: *This research aims to analyze strategies for optimizing the role of Generation Z beginner voters through political education ahead of the 2024 elections in Kubu Raya regency. The success of holding elections can be seen from the high level of participation of community groups. The lack of knowledge and awareness in understanding democracy and less than optimal political education for first-time voters can allegedly reduce the involvement of first-time voters in the 2024 elections, especially in regency generation Z and millennials dominate Kubu Raya's population, novice voter require special attention. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The data in this research were obtained from interviews with sources from beginner voters in Kubu Raya Regency, observations, and literature studies. This research found seven particular political education strategies implemented by the General Election Commission facing the 2024 elections in the Regency Kubu Raya in carrying out voter education programs to increase community participation.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik di Indonesia mencerminkan implementasi kedaulatan rakyat, dimana warga negara berperan aktif dalam proses politik, terutama melalui partisipasi dalam partai politik dan pemilihan umum. Peran aktif keterlibatan langsung warga negara terwujud dalam mekanisme demokrasi, di mana mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin dan memengaruhi arah kebijakan negara. Selain itu, partisipasi politik juga mencakup aktivitas lain seperti kampanye, diskusi, dan kegiatan politik yang mendorong partisipasi

publik. Secara keseluruhan, partisipasi politik adalah pilar utama dalam membangun sistem politik yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan politik masyarakat maka semakin tinggi partisipasi politik masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan (Mufti, 2019). Demokrasi dan partisipasi politik saling berhubungan, memainkan peran krusial dalam menentukan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik warga negara. Kesadaran politik mencerminkan sejauh mana partisipasi untuk mengekspresikan dukungan mereka dalam menetapkan pemerintah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan. Partisipasi politik adalah elemen penting dalam dinamika sebuah masyarakat yang demokratis. Memahami bahwa perubahan politik tidak dapat dicapai semata-mata oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kontribusi dari berbagai kelompok kepentingan. Ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan entitas lainnya dalam mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat terwujud partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses-proses politik, termasuk dalam konteks pemilihan umum (Iswanto & Pamungkas, 2023).

Beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan politik masyarakat memiliki korelasi positif dengan tingkat partisipasi politik mereka dalam proses kenegaraan. Demokrasi dan partisipasi politik saling terkait dan sangat penting dalam menegaskan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Kesadaran politik mencerminkan sejauh mana warga negara aktif dalam mengekspresikan dukungan mereka melalui proses pemilihan umum dan pembentukan kebijakan. Partisipasi politik juga tergantung pada kondisi politik yang sedang berlangsung dan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam proses demokratis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan berbagai kelompok kepentingan untuk memengaruhi dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum dianggap sebagai proses politik yang esensial dalam konteks konstusional negara demokratis. Sistem demokrasi diakui sebagai cara yang paling realistis dan rasional untuk mencapai tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang populis, adil, dan beradab, meskipun tetap dihadapkan pada beberapa kelemahan (Firmansyah & Kariyani, 2021). Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Pada pemilihan umum ini, jenis pemilih memerlukan perhatian khusus untuk melihat tingkat partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula (Moesafa dan Prihatmoko, 2008). Kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis idealisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara (Zulkifly et al., 2023). Kurangnya pengetahuan dan kesadaran demokrasi serta kurang optimalnya pendidikan politik bagi pemilih pemula disinyalir dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikut ini data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat tahun 2022 pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kab. Kubu Raya

No.	Kelompok Umur Age Groups	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0-4	28 084	26 628	54 712
2.	5-9	27 577	26 200	53 777
3.	10-14	27 843	25 892	53 735
4.	15-19	26 792	25 118	51 910
5.	20-24	29 125	27 946	57 071
6.	25-29	28 044	26 719	54 763
7.	30-34	25 891	25 269	51 160
8.	35-39	23 640	23 019	46 659
9.	40-44	21 979	21 156	43 135
10.	45-49	19 644	19 268	38 912
11.	50-54	16 981	16 447	33 428
12.	55-59	13 818	12 947	26 765
13.	60-64	9 744	9 041	18 785
14.	65-69	6 948	6 600	13 548
15.	70-75	4 219	3 992	8 211
16.	75+	4 104	4 450	8 554
Kabupaten Kubu Raya		314 433	300 692	615 125

Sumber : BPS Kab. Kubu Raya, 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat di Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh masyarakat generasi Z dan milenial. Generasi Z dalam rentang usia 15-19 tahun dengan jumlah 51.910 orang dan rentang usia 20-24 dengan jumlah 57.071 orang. Kelompok ini merupakan kelompok dengan jumlah penduduk tertinggi diantara kelompok lainnya sehingga membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan kelompok ini merupakan kelompok pemilih pemula yang pertama kali ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Kelompok tersebut tentu mempengaruhi tingkat partisipasi politik dan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga pemilih pemula sangat memerlukan pendidikan politik agar terciptanya partisipasi politik yang optimal. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada strategi optimalisasi peran pemilih pemula generasi Z melalui pendidikan politik menjelang pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian mengenai pendidikan politik bagi generasi milenial atau pemilih pemula telah banyak dilakukan oleh peneliti lain seperti penelitian mengenai "Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula" penelitian ini menganalisis masih rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu di kalangan pemuda Desa Gadingsari, penelitian ini menemukan bahwa perlu adanya penyuluhan Pemilu sebagai solusi Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula di desa Gadingsari (Zairudin et al., 2022). Selanjutnya penelitian dengan

judul “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020” pada penelitian ini menekankan bahwa perlunya adanya pendidikan politik bagi pemilih pemula di Sumbawa khususnya saat pandemi Covid-19 terjadi karena sebagian besar pemilih belum pernah melakukan pemilihan serta ruang gerak penyuluh yang minim akibat adanya kebijakan pembatasan dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 (Firmansyah & Kariyani, 2021). Dari dua penelitian sebelumnya dapat terlihat bahwa Pendidikan politik merupakan suatu solusi atau strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengenai strategi optimalisasi peran pemilih pemula generasi Z melalui pendidikan politik menjelang pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya dengan keterbaruan dari penelitian yaitu tempat serta lebih menekankan kepada strategi yang telah di terapkan oleh pihak-pihak terkait seperti KPU dan stake holder lainnya. Selain itu juga hal ini sejalan dengan konsep pendidikan politik yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk nilai dan orientasi politik dalam individu yang dapat mendorong partisipasi masyarakat (Kantaprawira, 2006). Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini dinilai penting bagi peneliti untuk dianalisis lebih dalam lagi dengan mempertimbangan berbagai strategi yang akan di terapkan dalam peningkatan peran pemilih pemula generasi Z melalui pendidikan politik menjelang pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan konstruktivis dalam metode penelitian kualitatif dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu (Erwinsyahbana & Ramlan, 2017). Jika metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis digunakan dalam ilmu politik, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana individu dan kelompok membentuk dan memahami realitas politik mereka. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana ideologi, identitas politik, dan narasi kebijakan dibangun melalui interaksi sosial dan wacana publik.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti sering menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam (Moleong, 2018). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara berinteraksi langsung dengan partisipan untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman, pandangan, dan pemikiran mereka. Selain itu, pengamatan langsung juga penting, di mana peneliti mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks alami. Selain itu, pemanfaatan dokumen seperti catatan, arsip, atau laporan juga menjadi sumber data yang berharga untuk memperkuat analisis dan memahami konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang sedang dipelajari dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian dengan pendekatan konstruktivis dalam metode penelitian kualitatif dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Jika metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis digunakan

dalam ilmu politik, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana individu dan kelompok membentuk dan memahami realitas politik mereka. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana ideologi, identitas politik, dan narasi kebijakan dibangun melalui interaksi sosial dan wacana publik. Penggunaan metode kualitatif seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen menjadi penting dalam memahami dinamika politik yang kompleks dan beragam.

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif di berbagai kegiatan pendidikan politik yang diadakan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal, serta melalui wawancara naratif dengan pemilih pemula dan pendidik politik. Observasi partisipatif memberikan konteks yang kaya mengenai interaksi dan dinamika dalam kegiatan pendidikan politik, sementara wawancara mengungkapkan cerita pribadi yang memberikan wawasan mendalam tentang persepsi dan motivasi individu. Responden penelitian ini terdiri dari pemilih pemula berusia 17-21 tahun yang berpartisipasi aktif dalam program-program pendidikan politik, serta pendidik politik yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan mereka memiliki pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen utama yang digunakan adalah panduan observasi dan panduan wawancara yang menggali pemahaman pemilih pemula tentang proses politik dan pemilu, perubahan sikap dan perilaku politik setelah mengikuti program pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan politik. Penelitian dilakukan selama enam bulan, dari Juli hingga Desember 2023, dengan lokasi penelitian tersebar di beberapa sekolah menengah atas dan pusat komunitas di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

Generasi Z dan Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dalam konteks modernisasi politik dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat yang belum mengalami kemajuan, kebijakan politik seringkali dianggap sebagai domain elit tertentu. Namun, dengan meningkatnya status sosial ekonomi, masyarakat cenderung lebih aktif dalam hal politik. Partisipasi politik sebenarnya mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam proses politik, mulai dari pengambilan keputusan hingga penilaian terhadap kebijakan yang dihasilkan, termasuk kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi yang berkembang di masyarakat yang lebih maju secara politik (Wahyuningsih, 2021).

Pemilih pemula adalah individu-individu yang baru pertama kali akan berpartisipasi dalam Pemilu dengan memberikan suaranya (Nur Wardhani, 2018). Kelompok ini biasanya terdiri dari remaja yang baru mencapai usia pemilih atau warga negara yang baru saja memenuhi syarat untuk memilih. Partisipasi mereka sangat penting karena mereka membawa perspektif dan energi baru ke dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, memahami sikap dan perilaku pemilih pemula dapat memberikan wawasan berharga bagi para kandidat dan partai politik dalam merancang strategi kampanye yang efektif. Dengan demikian, pemilih

pemula memainkan peran krusial dalam pembentukan masa depan politik suatu negara.

Partisipasi kelompok pemula di Kecamatan Batu Ampar masih sangat rendah, hal ini dapat terlihat dari minat pemilih pemula untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024. Hal ini didasari dengan berbagai latar belakang seperti kurangnya informasi yang mereka dapat tentang politik dan pemilihan umum serta tidak serta mereka tidak mengenal calon yang akan dipilih. Perlu adanya solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut khususnya di Kecamatan Batu Ampar khususnya dalam sosialisasi dan pemberian informasi mengenai politik dan pemilu yang akan datang. Bagi pemilih pemula penggunaan media konvensional dianggap kurang menarik dibandingkan media sosial, oleh karena itu penting bagi setiap pemangku kepentingan politik untuk membangun komunitas, tidak hanya berbasis fisik tetapi juga akses digitalisasi bagi kelompok pemula.

Partai atau pemangku kepentingan lainnya harus memiliki upaya dan inisiatif yang lebih konkret dengan membuka diskusi di media sosial. Partai politik atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan politik harus mengambil langkah-langkah konkret untuk terlibat dengan masyarakat melalui media sosial. Ini menekankan pentingnya berkomunikasi secara aktif dengan warga melalui platform online untuk memfasilitasi diskusi terbuka dan aksesibilitas yang lebih besar terhadap proses politik. Dengan membuka diskusi di media sosial, partai politik dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan pandangan mereka, dan mengartikulasikan tujuan serta rencana kebijakan secara lebih transparan. Ini juga mencerminkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren komunikasi modern dalam upaya untuk memperluas basis partisipasi politik.

Hal yang dapat dilakukan selanjutnya, yaitu mendorong kembali kelompok pemula untuk berpartisipasi dalam politik maupun pemilu. Perilaku pemilih secara umum di Kecamatan batu Ampar tidak selalu dipengaruhi oleh politik identifikasi partai dan tidak menjadi variabel yang paling kuat bagi masyarakat dalam menentukan suatu pilihan. Identifikasi partai politik terbentuk oleh dua faktor, yaitu sosialisasi partai politik dan faktor kekuasaan politik. Salah satu Kecamatan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah generasi Z atau calon pemilih pemuda di Kawasan Kecamatan Batu Ampar yang juga memiliki angka yang begitu besar untuk generasi Z atau pemilih pemula, seperti data berikut ini.

Tabel 2. Gen Z Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya

NO	NAMA DESA	L	P	L + P
1	Ambarawa	120	113	233
2	Batu Ampar	891	841	1,732
3	Medan Mas	99	120	219

4	Muara Tiga	147	137	284
5	Nipah Panjang	247	293	540
6	Padang Tikar Dua	490	470	960
7	Padang Tikar Satu	431	463	894
8	Sumber Agung	103	95	198
9	Sungai Besar	122	140	262
10	Sungai Jawi	110	105	215
11	Sungai Kerawang	134	159	293
12	Tanjung Beringin	53	54	107
13	Tanjung Harapan	150	140	290
14	Tasik Malaya	134	145	279
15	Teluk Nibung	363	349	712
TOTAL		3,594	3,624	7,218

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab. Kubu Raya, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan dari generasi Z atau calon pemilih pemula di Kawasan Batu Ampar berjumlah 7,218 angka berikut merupakan angka yang besar dalam pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024. Secara umum Partisipasi politik pemilih pemula di Kubu Raya khususnya di Batu Ampat yang masih dalam metode pemilihan umum yang dapat digolongkan sebagai pemilih tradisional. Hal ini terlihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana generasi Z atau yang menjadi pemilih pemula dalam acara partisipasi politik rutin seperti pemilu sangat terlihat, seperti faktor kepribadian, faktor lingkungan sosial dan politik.

Jumlah masyarakat di Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh masyarakat generasi Z dan milenial. Generasi Z dalam rentang usia 15-19 tahun dengan jumlah 51.910 orang dan rentang usia 20-24 dengan jumlah 57.071 orang (BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021). Pertanyaan yang diajukan peneliti saat wawancara para responden dapat menggambarkan pemikiran generasi Z atau pemuda dalam memandang Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti mengandung pendekatan tertentu, dengan pengelompokan pertanyaan menggunakan (a) Pendekatan sosiologis, yang terjadi pada sebagian besar generasi Z sebagai pemilih pemula di Kabupaten Kubu Raya ini memberikan hak pilih karena berdasarkan berbagai kepentingan salah satunya yaitu memilih dengan memepertimbangkan keuntungan pribadi. (b) pendekatan psikologis, generasi Z sebagai pemilih pemula memberikan dukungan dalam memilih dalam suatu pemilu karena pasangan calon yang dipilih adalah seorang tokoh Masyarakat atau tokoh yang sudah familiar atau dikenal sebelumnya. (c) Pendekatan ekologis, dalam sebuah pemilu, generasi Z sebagai pemilih pemula memilih

hanya sebatas entri data dan yang penting bagi mereka adalah memilih, bagaimana dampak pilihannya sepertinya tidak terlalu menjadi masalah (d) pendekatan struktural, Generasi Z seringkali terlibat dalam proses pemilu tanpa pertimbangan mendalam hanya karena telah mencapai usia pemilih pada usia 17 tahun. (e) Pendekatan pilihan rasional, pemilih pemula mulai mengembangkan kesadaran politik dengan mempertimbangkan visi, misi, dan rekam jejak calon yang akan mereka pilih (Harnawansyah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang melibatkan 20 narasumber dari pemilih pemula di Batu Ampar, Kubu Raya, yang akan pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2024 untuk memilih Presiden serta legislatif untuk 5 tahun yang akan datang, disinyalir pemilih pemula cenderung kurang memiliki kesadaran berpolitik. Rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang (Almuntasor et al., 2022).

Strategi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Strategi adalah rencana tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan baik kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam suatu konteks (Zakiruddin & Lestari, 2023). Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendalam pada satu generasi untuk yang diharapkan menjadi panduan dalam berbagai situasi. Pendidikan pemilih menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi (Arifin, 2014). Diharapkan bahwa melalui pendidikan politik, masyarakat dapat berkembang menjadi warga negara yang demokratis, memahami hak dan kewajiban mereka, serta memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diizinkan dan dilarang oleh hukum dan regulasi (Yuliandari et al., 2023). Dalam konteks ini, pemilih merujuk pada setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih saat pemilu atau pemilihan sedang berlangsung. Di Indonesia, kriteria tersebut meliputi batasan usia 17 tahun, status perkawinan, dan kewarganegaraan Indonesia. Warganegara yang memenuhi syarat ini disebut sebagai pra-pemilih. Pendidikan Pemilih merupakan upaya yang berpotensi menjadikan pemilih di masa mendatang. Dalam pendidikan pemilih, terdapat aspek-aspek krusial seperti memberikan informasi tentang hak memilih, pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu, dan konsep dasar demokrasi. Tujuan utama dari pendidikan pemilih adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih melalui penyampaian informasi yang terperinci dan komprehensif. Pendidikan politik bisa dilakukan baik secara formal maupun informal.

Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab secara formal pada fungsi tersebut, meliputi pemerintah (suprastruktur) seperti lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan partai politik. Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menyediakan pemahaman dasar tentang proses politik dan partisipasi warga negara dalamnya. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peran dalam mengatur dan menyelenggarakan proses politik secara keseluruhan, termasuk pemilihan umum dan pembuatan kebijakan. Sedangkan partai politik, sebagai aktor politik utama, berperan dalam membentuk opini publik, menawarkan platform

kebijakan, dan memobilisasi pemilih selama kampanye pemilu. Dengan demikian, struktur pemerintahan, melalui lembaga-lembaga ini, berperan dalam menjaga stabilitas dan kelancaran sistem politik dalam suatu negara.

Sejalan dengan hal di atas, lembaga informal dengan fungsi pendidikan politik dijalankan oleh berbagai entitas, termasuk keluarga, kelompok asosiasi dan non-asosiasi, organisasi nirlaba, tokoh masyarakat, dan *public figure*. Perlu diketahui, sejak awal era reformasi, kebebasan dan kekerasan menjadi fenomena perubahan sosial-politik di Indonesia. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, di sisi lain, kekerasan muncul dalam berbagai bentuk ekspresi, mengindikasikan adanya struktur mendasar yang serupa di baliknya. Kekerasan ini mencerminkan ketegangan dan konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam tatanan sosial dan politik. Dengan demikian, dinamika ini menunjukkan kontradiksi yang signifikan dalam perjalanan demokratisasi Indonesia (Arrianie, 2021). Di Indonesia, KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menetapkan sasaran-sasaran khusus pendidikan pemilih, melibatkan berbagai segmen masyarakat. Adapun tujuan pendidikan pemilih adalah:

1. Peningkatan Partisipasi.

Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pemilih. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan politik. Selama periode pemilihan, tujuan pendidikan pemilih adalah mendorong partisipasi aktif pemilih pada setiap tahap pemilihan. Demokrasi yang matang membutuhkan partisipasi suara sekitar 70%. Partisipasi ini bukan hanya soal mobilisasi, melainkan juga mengenai keberlanjutan keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi. Angka partisipasi yang signifikan sangat penting untuk mempertimbangkan biaya tinggi pemilihan, legitimasi pejabat yang terpilih, dan efektivitas sistem demokrasi. Pendidikan pemilih di luar masa pemilihan bertujuan untuk mendorong partisipasi pemilih dalam mengawasi agenda politik, menegaskan janji-janji kampanye, serta memberikan kritik dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

2. Peningkatan Literasi Politik.

Literasi politik meliputi pemahaman, keterampilan, dan tindakan yang memungkinkan pemilih untuk terlibat secara efektif dalam pemerintahan. Kemampuan literasi politik ini menjadi kunci untuk partisipasi politik yang bermakna. Dengan memiliki literasi politik yang baik, pemilih dapat memahami bagaimana cara terlibat dan berperilaku dalam konteks politik. Hal ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya menjaga kepentingan pribadi mereka tetapi juga untuk menghindari upaya manipulasi. Tingkat literasi politik yang tinggi juga memfasilitasi hubungan yang erat antara pemilih dan proses politik, termasuk keterlibatan negara dan masyarakat sipil.

3. Peningkatan Kerelawanan (Voluntaritas).

Pendidikan pemilih berupaya mendorong sikap kerelawanan, di mana partisipasi dalam proses politik didorong oleh idealisme daripada kepentingan materi. Kesadaran individu untuk berpartisipasi tanpa pamrih menjadi esensi dari kerelawanan. Sebaliknya, pendekatan pragmatis pemilih yang berfokus

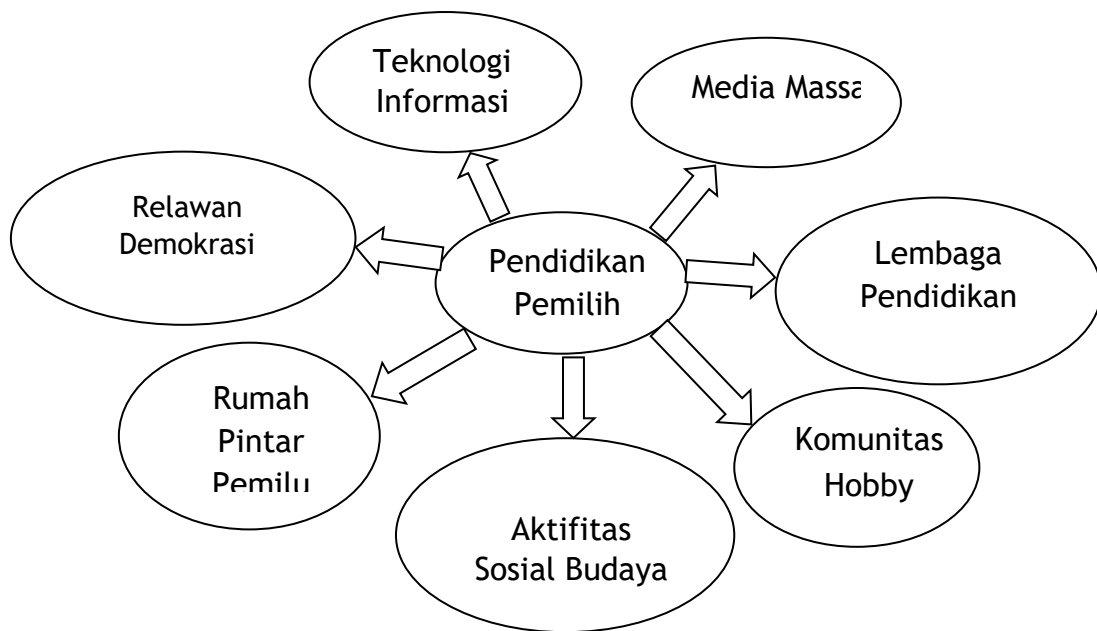
pada insentif material dapat mengakibatkan komodifikasi partisipasi politik. Sikap pragmatis ini melibatkan pemilihan terlibat dalam proses politik dengan harapan mendapatkan kompensasi materi. Diperlukan upaya dari pendidikan pemilih untuk menggalakkan semangat kerelawanan sambil mengurangi sikap pragmatis, karena keberadaan kerelawanan yang kuat sangat penting dalam memperkuat dasar-dasar demokrasi dan keberlanjutan politik.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2023, seorang perwakilan dari KPU Kabupaten Kubu Raya menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum memiliki dampak besar terhadap parameter demokrasi, dan penurunan partisipasi masyarakat dapat mengancam konsolidasi demokrasi di Indonesia. KPU Kubu Raya berupaya mensukseskan kegiatan pendidikan yang dilakukan secara berkala dan terarah. Kegiatan ini memfokuskan pada segmen pemilih tertentu, termasuk pendidikan pemilih untuk perempuan, pemula, dan khusus disabilitas. Upaya ini bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam mengenai proses penyelenggaraan pemilu. pendidikan pemilih khusus untuk pemilih pemula, dihadiri oleh siswa di Madrasah Aliyah Sungai Raya. Selain itu, pada tanggal 23 September 2023, dilakukan sosialisasi pemilu bagi pemilih muda yang melibatkan kader dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Kubu Raya.

Keberhasilan pada pemilihan umum berikutnya, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terorganisir. Selain langkah-langkah yang telah disoroti sebelumnya, terdapat beragam tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencapai tujuan tersebut (Rahmaini et al., 2021). Salah satu pendekatan yang sangat bernilai adalah melibatkan generasi muda secara aktif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, dan mereka dapat berperan sebagai mentor bagi rekan sebaya mereka yang baru dalam proses pemilihan. Dengan membantu mereka memahami isu-isu yang relevan dengan pemilu dan memberikan bimbingan selama proses pemilihan, generasi muda dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan partisipasi politik. Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi politik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus menjadi bagian integral dari kurikulum di semua tingkat pendidikan, dan harus diimplementasikan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Kesuksesan pemilihan umum yang bermutu sangat berkaitan dengan keterlibatan masyarakat secara aktif. Salah satunya adalah kemampuan para pemilih untuk memahami isu politik dengan rasional dan mampu menilai secara kritis, sehingga pilihan politik mereka didasarkan pada pertimbangan yang logis dan bijaksana (Sutisna, 2017). Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan pemilih harus merangkul beberapa strategi yang mencakup berbagai aspek pemilih (Manik et al., 2015). Ada tujuh strategi khusus dalam program pendidikan pemilih yang dijalankan oleh KPU yaitu:

Gambar 1. Strategi Pendidikan Pemilih



Berdasarkan gambar terkait Strategi Pendidikan Pemilih di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal berikut.

1. Rumah Pintar Pemilu.

Mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018, Pendidikan Pemilih dapat diwujudkan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum. Upaya meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas, dibutuhkan digitalisasi materi dan informasi Rumah Pintar Pemilihan Umum. Rumah Pintar Pemilu bertindak sebagai pusat pendidikan pemilih, menyediakan beragam program, audio visual, ruang pameran, simulasi, dan diskusi. Secara konseptual, dapat diartikan sebagai museum pemilu. Rumah Pintar Pemilu merupakan tempat khusus untuk melakukan pendidikan pemilih. Rumah ini dapat memanfaatkan ruang dari suatu bangunan atau struktur khusus, di mana berbagai program pendidikan pemilih diselenggarakan. Di satu sisi, Rumah Pintar Pemilu menjadi tempat untuk berbagai kegiatan pendidikan pemilih, sementara di sisi lain, berfungsi sebagai wadah bagi komunitas pegiat pemilu untuk membangun gerakan. Fasilitas seperti penayangan audio visual, ruang lab, dan ruang diskusi disediakan untuk menyampaikan informasi mengenai pemilu dan demokrasi. Secara keseluruhan, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat diaktifkan sebagai museum pemilu. Khususnya dalam konteks Pendidikan Pemilih Segmen Pemula, kegiatan ini memiliki tujuan untuk kecakapan politik kepada pemilih pemula. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terlibat secara aktif dan cerdas dalam proses politik di masa depan.

2. Teknologi Informasi

Disinyalir seluruh masyarakat kini memiliki keterlibatan dengan teknologi informasi, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi ini. Situasi ini memerlukan respons yang efektif dalam konteks pendidikan pemilih. Informasi

dapat menjangkau sangat luas dan memungkinkan melalui teknologi. Pendidikan pemilih yang menggunakan teknologi informasi kontemporer akan mendorong partisipasi aktif pemilih. Masyarakat akan didorong untuk memberikan kontribusi dan umpan balik terhadap topik sebagai hasil dari kesadaran pribadi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, menjadi pendorong bagi advokasi publik terkait suatu isu atau permasalahan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan ide atau kepentingannya, sambil meminta dukungan dari orang lain.

3. Media Massa

Media massa masih merupakan alat yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada pemilih. Jenis media ini terbagi menjadi dua kategori utama: media cetak dan media elektronik. Media massa, dengan fungsi persuasifnya, memiliki potensi untuk membentuk kesadaran pemilih dan memengaruhi opini mereka terhadap berbagai isu yang sedang berkembang. Media massa juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi budaya politik dan perilaku politik pemilih. Media massa dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat kapanpun dan dimanapun berada. Peran media massa sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan pemilih untuk meningkatkan tingkat kecerdasan warga negara dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

4. Lembaga Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam mendukung pendidikan pemilih. Sejalan dengan keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, pemilih di lembaga pendidikan cenderung memiliki solidaritas yang kuat. Jumlah pemilih di lembaga pendidikan memiliki signifikansi yang besar, melibatkan baik pra-pemilih maupun pemilih pemula. Pendidikan pemilih melalui lembaga pendidikan bukan sekadar menjadi fondasi, tetapi juga menjadi filter yang efektif terhadap berbagai informasi yang mencapai pemilih. Pendidikan pemilih di lembaga pendidikan menjadi pondasi yang kokoh, membentuk tidak hanya pemahaman tetapi juga sikap dan perilaku pemilih di masa depan. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan ini akan membentuk karakter pemilih. Dengan demikian, pendidikan pemilih di lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan informasi pemilu, tetapi juga membentuk warganegara yang cerdas dan berpikiran kritis.

5. Pemanfaatan Aktivitas Sosial Budaya

Aktivitas sosial budaya di Indonesia menjadi landasan penting dalam pendidikan politik terutama dalam konteks pemilihan umum. Setiap festival, pawai budaya, atau pertunjukan seni, pesan-pesan mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemilihan umum dapat disampaikan secara tidak langsung melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut. Pertemuan tersebut menjadi forum yang tepat untuk membahas isu-isu politik lokal, mengenalkan calon, dan membangun kesadaran politik bagi pemilih dengan mengangkat tema-tema keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Penonton tidak hanya dihibur tetapi juga dididik tentang pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki visi misi pembangunan yang jelas. Selain memamerkan kekayaan budaya local, aktivitas sosial budaya juga dapat menjadi wadah untuk

menyampaikan informasi tentang proses pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih serta menjadi kesempatan untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan nilai-nilai yang mendasari demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Sehingga, masyarakat dapat memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kebebasan berekspresi, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik sebagai warga negara yang bertanggung jawab, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap tahapan pemilihan umum.

6. Komunitas Hobi

Walaupun kegiatan hobi tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia politik atau proses pemilihan, program pendidikan pemilih tetap memiliki peluang untuk terlibat dengan komunitas hobi. Meskipun pendekatannya tidak dapat segera disesuaikan dengan pendekatan umum dari program pendidikan pemilih, karakteristik komunitas hobi yang bersifat a-politis dan terkadang kurang antusias terhadap kegiatan politik tidak menjadi kendala. Dengan pendekatan yang tepat, komunitas hobi dapat menjadi platform yang efektif untuk proses pendidikan politik di negeri ini. Keberhasilan pendidikan pemilih melalui komunitas hobi sangat bergantung pada ikatan kuat di antara anggotanya, sehingga pemahaman individu atau beberapa anggota tentang tujuan pendidikan pemilih dapat memberikan dampak positif pada anggota lainnya.

7. Relawan Demokrasi.

Relawan demokrasi memainkan peran yang krusial dalam memperkuat partisipasi dan pemahaman politik masyarakat dalam konteks pemilihan umum. Mereka adalah individu atau kelompok sukarelawan yang dengan tulus berkontribusi untuk mencerdaskan warga negara dan terlibat aktif dalam proses demokratisasi. Konsep relawan demokrasi mencakup berbagai terminologi seperti relawan pemilu, pioneer pemilu, atau duta pemilu. Intinya, konsep relawan demokrasi menekankan semangat sukarela dari pemilih untuk mendidik sesama dan berpartisipasi dalam memperkuat aspek demokratisasi. Program relawan demokrasi melibatkan partisipasi aktif masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi pionir demokrasi di komunitas mereka. Mereka bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menjadi mitra penting dalam mengimplementasikan agenda pendidikan pemilih. Kelompok-kelompok strategis di masyarakat diorganisir dan diajak untuk terlibat sebagai relawan demokrasi, menjadikan inisiatif ini sebagai gerakan sosial yang luas dan berdampak. Para relawan memainkan peran penting dalam memberikan informasi, memberikan pemahaman tentang proses pemilu, serta merangsang partisipasi aktif dalam hak suara. Melalui kesukarelaan dan semangat partisipatif ini, relawan demokrasi membantu menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi yang kuat dan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses politik.

KESIMPULAN

Kelompok pemilih pemula menjadi salah satu kelompok yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kesuksesan partisipasi pada pemilihan umum pada

tahun 2024 di Kecamatan Batu Ampar. Namun, partisipasi dalam politik kelompok pemula di Kecamatan Batu Ampar cenderung masih sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari minat pemilih pemula untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah kurangnya informasi yang mereka dapat tentang politik dan pemilihan umum serta tidak serta mereka tidak mengenal calon yang akan dipilih. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang demokrasi, bersama dengan kurangnya pendidikan politik yang optimal bagi pemilih pemula, dapat berpotensi menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilu 2024. Jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh kelompok generasi Z dan generasi milenial sebagai pemilih pemula yang memerlukan perhatian khusus.

Diperlukan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut khususnya di Kecamatan Batu Ampar khususnya misalnya gencarnya kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai politik dan pemilu yang akan datang. Selain itu, diharapkan bahwa implementasi tujuh strategi khusus pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum dapat menjadi program yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut meliputi penerapan rumah pintar pemilu, penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa, peran lembaga pendidikan, serta aktivitas sosial budaya dan komunitas hobi. Selain itu penggunaan media konvensional dianggap kurang menarik saat ini bagi pemilih pemula dunia maya dianggap lebih menarik. Karena itu, penting bagi setiap pemangku kepentingan politik untuk memperkuat komunitas, baik yang ada secara fisik maupun dalam ruang online, terutama untuk kelompok pemilih pemula. Partai atau pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan upaya dan inisiatif yang lebih konkret dengan membuka diskusi di media sosial. Kemudian dorong kembali kelompok pemula untuk berpartisipasi dalam politik maupun pemilu.

REFERENSI

- Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Ke depan. *Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology)*, 1(1), 389-403.
- Arifin, A. (2014). *Politik Pencitraan Pencitraan Politik* (Kedua). Graha Ilmu.
- Arriane, L. (2021). *KOMUNIKASI POLITIK (Dramatisme dan Pencitraan Politisi di Panggung Politik)* (Y. S. Hayati (ed.); Edisi 1). PT Rajagrafindo Persada.
- BPS Kabupaten Kubu Raya. (2021). Kecamatan Batu Ampar Dalam Angka 2021. In *Katalog* (p. 102). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Dicitak.
- Erwinsyahbana, T., & Ramlan. (2017). *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*. 2, 2588-2593. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i1.706>.
- Firmansyah, J., & Kariyani, L. N. (2021). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1232-1237. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2534>.

- Harnawansyah, M. F. (2019). *Sistem Politik Indonesia* (M. P. Dedi, S.Pd. (ed.). Scopindo.
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.192>.
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Sinar Baru Algensindo.
- Manik, H. K., Pamungkas, S., Rizkyansyah, F. K., Gumay, H. N., Budhiati, I., Budiman, A., & Ardiantoro, J. (2015). Buku Pedoman pendidikan pemilih. *Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 35.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mufti, M. (2019). *Teori-Teori Politik*. CV Pustaka Setia.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.
- Rahmaini, P., Bagenda, C., Heri, K., & Safrinal. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (F. Yudistira (ed.). CV Pena Persada.
- Sutisna, A. (2017). Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 6(2), 257-270.
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. *Public Service and Governance*, 2, 1-10.
- Yuliandari, E., Muchtarom, M., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 186. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205>.
- Zairudin, A., Abdurrahma, & Faqih, M. I. (2022). *Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu terhadap Pemilih Pemula*. 3(3), 1809-1815. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>.
- Zakiruddin, M. A., & Lestari, B. I. (2023). Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8(1), 107-115.
- Zulkifly, Massyat, M., & Daud, Y. (2023). Budaya dan Perilaku Politik Mahasiswa (Studi Kasus Universitas Al Asyariah Mandar). *Journal Peqguruang: Conference Series*, 5(1), 142. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.3598>.